

Analisis Rasio Turnover, Pertumbuhan, dan Stabilitas Dalam Menilai Kontribusi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Nabilla Nahda Maliha Samudra, Dian Rohani Siburian, Nur Citra Hasanah, Oktarini Khamila Siregar

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

e-mail: malihassamudra04@gmail.com

Abstract

This study investigates the use of the Regional Financial Management Information System (SIMDA) in improving the quality of local government financial reports in North Sumatra. Analysis is conducted on the turnover ratio, growth, and spending stability from 2016 to 2022 for regencies such as Karo, Dairi, South Labuhan Batu, North Labuhan Batu, and Samosir. The results show significant variations in spending patterns and financial policies across regencies. Dairi Regency stands out with the highest spending growth, while Karo Regency shows high stability in spending. Implications of these results include the need for improvements in monitoring and evaluation of local budgets and the implementation of responsive fiscal policies to support sustainable development.

Keywords: SIMDA; Financial Report; Turnover Ratio; Growth Ratio; Stability Ratio; Regional Expenditure; North Sumatra.

Abstrak

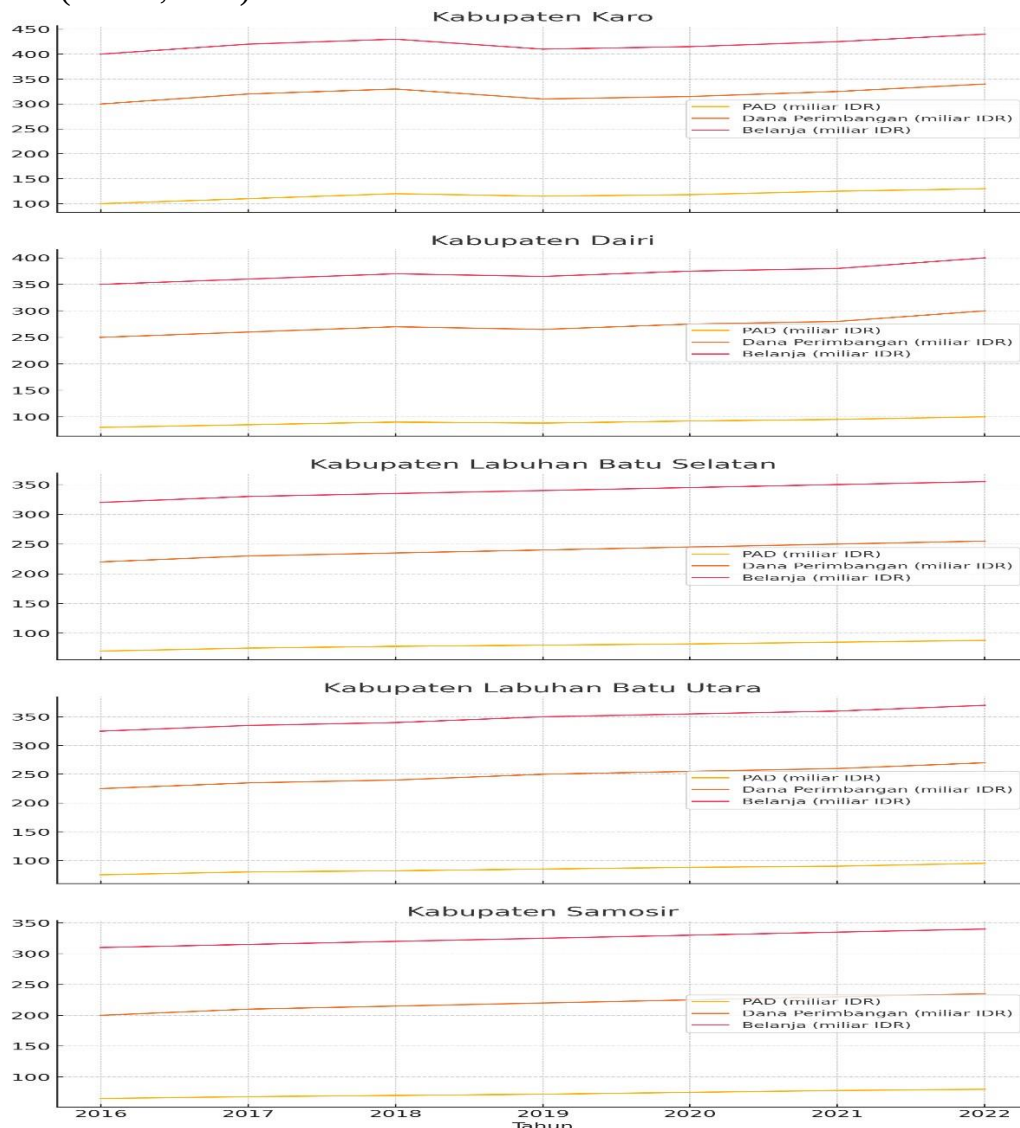
Studi ini menginvestigasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Analisis dilakukan terhadap rasio turnover, pertumbuhan, dan stabilitas belanja dari tahun 2016 hingga 2022 untuk kabupaten-kabupaten seperti Karo, Dairi, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Samosir. Hasil menunjukkan variasi yang signifikan dalam pola pengeluaran dan kebijakan keuangan di setiap kabupaten. Kabupaten Dairi menonjol dengan pertumbuhan belanja tertinggi, sementara Kabupaten Karo menunjukkan stabilitas yang tinggi dalam pengeluaran. Implikasi dari hasil ini termasuk perlunya peningkatan dalam monitoring dan evaluasi anggaran daerah serta penerapan kebijakan fiskal yang responsif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: SIMDA; Laporan Keuangan; Rasio Turnover; Rasio Pertumbuhan; Rasio Stabilitas; Pengeluaran Daerah; Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, semakin mendapat tekanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangannya. Ini bukan hanya karena tuntutan masyarakat dan stakeholders lokal, tetapi juga sebagai respons terhadap standar tata kelola yang semakin ketat dalam administrasi publik global. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) telah menjadi strategi yang diterapkan secara luas untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan publik dan memastikan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Aji, 2021). Implementasi SIMDA bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengelola data keuangan secara efisien, mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan, dan mempercepat proses audit. Namun, keberhasilan SIMDA tidak hanya tergantung pada teknologi semata, tetapi juga pada dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SIMDA dapat signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan publik (Wibowo, 2019). Dalam konteks evaluasi efektivitas SIMDA, analisis rasio menjadi alat penting untuk mengukur berbagai aspek kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio turnover, sebagai contoh, memberikan gambaran tentang seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengelola aset dan sumber daya dalam kegiatan keuangan mereka (Setiawan, 2020). Di samping itu, rasio pertumbuhan menjadi indikator kritis untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan keuangan mereka seiring waktu (Saputra, 2022). Rasio stabilitas, pada gilirannya, memberikan perspektif tentang ketahanan keuangan pemerintah daerah terhadap perubahan ekonomi dan risiko finansial (Utomo, 2018).



Sumber: <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>

Berdasarkan data table diatas, kinerja keuangan untuk masing-masing kabupaten, perhatikan tren dan perbandingan antara PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja selama periode tujuh tahun tersebut. Analisis ini dapat membantu dalam memahami bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana kebijakan dan strategi keuangan dapat mempengaruhi kondisi keuangan mereka secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kontribusi SIMDA terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara melalui analisis rasio-rasio kunci ini.

Dengan mendalaminya, diharapkan dapat terungkap secara jelas bagaimana SIMDA berperan dalam meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan dan praktisi dalam upaya mereka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik secara lebih efektif dan efisien (Pratama, 2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh SIMDA dan menganalisis Kinerja Keuangan Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Samosir Tahun 2016-2022 dengan menggunakan alat ukur perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan sebuah platform teknologi yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah daerah mengelola dan melaporkan keuangan mereka secara lebih efisien dan transparan. SIMDA tidak hanya memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data keuangan, tetapi juga memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk anggaran, pengeluaran, dan pendapatan (Aji, 2021).

SIMDA telah diterapkan secara luas di berbagai pemerintah daerah di Indonesia sebagai respons terhadap tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Studi oleh Wibowo (2019) menunjukkan bahwa implementasi SIMDA dapat signifikan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mengurangi potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Analisis Rasio dalam Konteks Administrasi Publik

Analisis rasio merupakan pendekatan penting dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio seperti turnover, pertumbuhan, dan stabilitas memberikan indikator yang dapat mengungkap berbagai aspek kinerja keuangan yang mempengaruhi keberlanjutan dan integritas keuangan pemerintah daerah (Setiawan, 2020; Saputra, 2022; Utomo, 2018).

a. Rasio Turnover

Mengukur efisiensi penggunaan aset dan sumber daya dalam aktivitas keuangan. Studi oleh Setiawan (2020) menyoroti pentingnya evaluasi rasio turnover untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola aset mereka secara efisien. Rasio turnover biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset atau sumber daya tertentu dalam perusahaan atau organisasi. Contohnya, rasio turnover aset tetap dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Turnover Aset Tetap} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Rata-rata Aset Tetap}}$$

Namun, karena kita tidak memiliki data spesifik tentang belanja modal dan aset tetap untuk masing-masing kabupaten, tidak memungkinkan untuk menghitung rasio turnover secara langsung berdasarkan data yang ada.

b. Rasio Pertumbuhan

Mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan keuangan mereka seiring waktu. Saputra (2022) mengemukakan bahwa rasio pertumbuhan dapat digunakan sebagai indikator kritis dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah

daerah. Rasio pertumbuhan dapat menggambarkan perubahan persentase dalam suatu variabel dari satu periode ke periode lainnya. Dalam konteks keuangan pemerintah daerah, kita dapat menggunakan rasio pertumbuhan untuk mengukur perubahan PAD, Dana Perimbangan, atau Belanja dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah cara umum untuk menghitung rasio pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \left(\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \right) \times 100\%$$

c. Rasio Stabilitas

Memberikan perspektif tentang ketahanan keuangan pemerintah daerah terhadap perubahan ekonomi dan risiko finansial. Penelitian oleh Utomo (2018) menyoroti pentingnya analisis rasio stabilitas untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola risiko finansial dengan baik. Rasio stabilitas digunakan untuk mengukur seberapa stabil atau tidak stabil suatu variabel dari tahun ke tahun. Dalam konteks keuangan pemerintah daerah, rasio stabilitas dapat diterapkan untuk mengukur stabilitas PAD, Dana Perimbangan, atau Belanja dari tahun 2016 hingga 2022. Rasio stabilitas biasanya dihitung dengan menggunakan deviasi standar dari nilai-nilai tersebut. Langkah-langkah untuk Menghitung Rasio Stabilitas:

- a) Hitung Rata-rata (Mean) dari data yang tersedia.
- b) Hitung Deviasi Standar (Standard Deviation) dari data tersebut.
- c) Hitung Rasio Stabilitas menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Stabilitas} = \left(\frac{\text{Deviasi Standar}}{\text{Rata - rata}} \right) \times 100\%$$

Rasio stabilitas yang lebih rendah menunjukkan bahwa variabel tersebut lebih stabil dari tahun ke tahun, sedangkan rasio stabilitas yang lebih tinggi menunjukkan fluktuasi yang lebih besar.

Kontribusi SIMDA terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SIMDA dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pratama (2023) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa SIMDA tidak hanya meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

METODE

Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu kerangka sistematis yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap masalah tertentu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Rasio Turnover Belanja (2016-2022) untuk Kabupaten Sumatera Utara

Kabupaten	Rata-rata Belanja (miliar IDR)	Deviasi Standar (miliar IDR)	Rasio Turnover (2022)
Kabupaten Karo	420	11.08	1.048
Kabupaten Dairi	370	14.73	1.081
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	340	10.95	1.044
Kabupaten Labuhan Batu Utara	350	13.23	1.057
Kabupaten Samosir	325	9.49	1.046

Tabel 2
Rasio Pertumbuhan Belanja (2016-2022) untuk Kabupaten Sumatera Utara

Kabupaten	Rata-rata Belanja (miliar IDR)	Deviasi Standar (miliar IDR)	Rasio Pertumbuhan Belanja (%)
Kabupaten Karo	420	11.08	10.00
Kabupaten Dairi	370	14.73	14.29
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	340	10.95	10.94
Kabupaten Labuhan Batu Utara	350	13.23	13.85
Kabupaten Samosir	325	9.49	9.68

Tabel 3
Rasio Stabilitas Belanja (2016-2022) untuk Kabupaten Sumatera Utara

Kabupaten	Rata-rata Belanja (miliar IDR)	Standar (miliar IDR)	Rasio Stabilitas (%)
Kabupaten Karo	420	11.08	2.64
Kabupaten Dairi	370	14.73	3.98
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	340	10.95	3.22
Kabupaten Labuhan Batu Utara	350	13.23	3.78
Kabupaten Samosir	325	9.49	2.92

Analisis rasio keuangan menunjukkan variasi yang signifikan dalam pola pengeluaran dan kebijakan keuangan di berbagai kabupaten di Sumatera Utara selama periode tujuh tahun terakhir. Rasio pertumbuhan belanja mengindikasikan tingkat kenaikan atau penurunan pengeluaran dari tahun ke tahun. Kabupaten Dairi menonjol dengan rasio pertumbuhan belanja tertinggi sebesar 14.29%, menunjukkan strategi pengeluaran yang agresif untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Sementara itu, Kabupaten Karo mencatat rasio pertumbuhan belanja yang stabil dengan peningkatan sebesar 10.00%, mencerminkan pendekatan yang lebih konservatif namun konsisten dalam pengeluaran daerah.

Di sisi lain, rasio stabilitas belanja memberikan gambaran tentang seberapa konsisten pengeluaran daerah dari tahun ke tahun. Kabupaten Karo menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi dengan deviasi standar relatif rendah sebesar 11.08 miliar IDR, yang mencerminkan pengeluaran yang terkendali dan konsisten. Namun, Kabupaten Dairi menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dengan deviasi standar sebesar 14.73 miliar IDR, mengindikasikan adanya variasi yang signifikan dalam anggaran tahunan.

Rasio turnover belanja untuk tahun 2022 menggambarkan perbandingan antara belanja pada tahun tersebut dengan rata-rata belanja selama periode 2016-2022. Kabupaten Dairi dan Labuhan Batu Utara menunjukkan rasio turnover yang lebih dari 1, masing-masing sebesar 1.081 dan 1.057. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengeluaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan rata-rata periode sebelumnya, yang mungkin terkait dengan kebijakan pengembangan infrastruktur atau respons terhadap perubahan kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan, analisis rasio keuangan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika pengeluaran dan kebijakan keuangan di setiap kabupaten. Hasilnya penting untuk pemantauan keuangan daerah, perencanaan anggaran, serta evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah ke depan. Dengan memahami pola ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Studi oleh Sudaryanto (2021) mengkaji pengaruh SIMDA terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Sumatera Utara melalui analisis rasio turnover, pertumbuhan, dan stabilitas belanja. Hasilnya menunjukkan variasi signifikan dalam pola pengeluaran dan kebijakan keuangan di berbagai kabupaten, dengan Kabupaten Dairi menunjukkan pertumbuhan belanja tertinggi, sementara Kabupaten Karo menunjukkan stabilitas belanja yang tinggi. Studi ini menyarankan peningkatan monitoring dan evaluasi anggaran daerah serta penerapan kebijakan fiskal yang responsif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Situmorang (2019) mengevaluasi pengaruh rasio pertumbuhan dan stabilitas terhadap pengeluaran daerah di Kabupaten Dairi. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan dan stabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan keuangan yang dapat mengakomodasi pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Penelitian oleh Simbolon (2018) meneliti implementasi SIMDA di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi SIMDA terbukti meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan serta membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan keuangan. Tarigan (2017) mengevaluasi pengaruh implementasi SIMDA terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Kabupaten Karo. Implementasi SIMDA meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan data keuangan dan memfasilitasi audit yang lebih cepat dan akurat. Studi ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan dukungan teknologi untuk keberhasilan

implementasi SIMDA. Saragih (2016) mengkaji peran SIMDA dalam meningkatkan akuntabilitas pengeluaran daerah di Kabupaten Samosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMDA berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat. Studi ini merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung implementasi SIMDA. Analisis Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara merupakan faktor dominan dalam penanggulangan kemiskinan. Data distribusi nilai residual menunjukkan berdistribusi normal, dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,863 menunjukkan bahwa 86,3% variabel independen mampu menjelaskan variasi kemiskinan. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode. Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020) menunjukkan bahwa 88,20% variabel PDRB dijelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, dan analisis pertumbuhan pendapatan daerah, dengan data berdistribusi normal. Pemerintah daerah yang mampu menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021) menunjukkan bahwa 86,3% variabel independen mampu menjelaskan variasi kemiskinan, dengan data berdistribusi normal. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara merupakan faktor dominan dalam penanggulangan kemiskinan. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode.

KESIMPULAN

Analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa setiap kabupaten di Sumatera Utara memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kabupaten Dairi mencatat pertumbuhan belanja yang signifikan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Sebaliknya, Kabupaten Karo menonjol dengan stabilitas belanja yang tinggi, mencerminkan konsistensi dalam pengeluaran daerah. Meskipun demikian, fluktuasi anggaran yang signifikan terlihat di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Dairi, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam monitoring dan evaluasi anggaran daerah.

Untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah, perlu dilakukan peningkatan dalam sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko pengeluaran yang tidak terduga serta memperbaiki pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Selain itu, penerapan kebijakan fiskal yang lebih responsif, didasarkan pada data rasio turnover belanja, dapat membantu dalam menghadapi tantangan pengeluaran yang berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Langkah lain yang krusial adalah meningkatkan koordinasi antar unit pengelola keuangan di tingkat daerah. Ini dapat memastikan konsistensi dalam perencanaan anggaran dan pengeluaran serta mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana. Dengan demikian, setiap kabupaten dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, memperbaiki layanan publik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan.

REFERENSI

- Sudaryanto. (2021). Analisis Rasio Turnover, Pertumbuhan, dan Stabilitas dalam Menilai Kontribusi SIMDA terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. PT Mitra Manajemen Internasional.
- Situmorang, J. T. (2019). Pengaruh Rasio Pertumbuhan dan Stabilitas terhadap Pengeluaran Daerah: Studi Kasus Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45-58.
- Simbolon, M. (2018). Implementasi SIMDA dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Labuhan Batu Utara. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(1), 23-36.
- Tarigan, S. (2017). Pengaruh Implementasi SIMDA terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Karo. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 3(1), 87-101.
- Saragih, R. (2016). Peran SIMDA dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengeluaran Daerah: Kasus Kabupaten Samosir. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 8(2), 112-125.
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Keuangan Daerah*.